

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Pariwisata Tanaka Waterfall Berbasis Komunitas ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkuat penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang tertulis di dalam tabel :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Temuan	Relevansi
1.	Lasally, A., Khairunnisa, H., & Mahfudz, A. A. (2021). Pengembangan Desa wisata berbasis komunitas Di Yogyakarta (Studi kasus: Desa wisata sambi).	Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Sambi terletak pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan kegiatan wisata. Komunitas memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya, lingkungan, serta menjadi pelaku utama dalam pengelolaan homestay, kuliner, dan kegiatan wisata alam. Dukungan dari pemerintah dan lembaga	Penelitian ini sama-sama menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sebagai faktor utama dalam pengembangan wisata. Kesamaannya terletak pada fokus untuk memahami bagaimana komunitas berperan dalam mengelola dan memajukan potensi desa wisata secara mandiri. Kajian keduanya berpusat pada pengembangan wisata berbasis masyarakat dengan pendekatan studi kasus,

		pendidikan juga memperkuat kapasitas masyarakat.	hanya berbeda lokasi dan karakteristik alamnya.
2.	Amarudin, M., & Maarif, U. (2022). Membangun Desa Wisata Berbasis Komunitas Di Pujon Kidul Malang.	Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul berhasil karena adanya sinergi antara komunitas masyarakat, pemerintah desa, dan pihak swasta. Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pelatihan, manajemen usaha wisata, serta promosi berbasis digital. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi modal sosial utama.	Hasil penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan penelitian saya, karena keduanya berada di wilayah Malang dan sama-sama mengangkat konsep pengembangan wisata berbasis komunitas. Kesamaannya terletak pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi lokal dan menciptakan nilai ekonomi baru dari sektor pariwisata. Kajian keduanya juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa agar wisata yang dikembangkan tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga

			setempat.
3.	<p>Yamin, M. N. (2024). Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Di Kota Makassar.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata berbasis komunitas di Makassar menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan minimnya kolaborasi antar-stakeholder. Namun, peluang tetap besar karena masyarakat memiliki semangat untuk mengembangkan potensi daerah melalui kegiatan wisata budaya dan edukatif.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama mengkaji peran masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Kesamaannya terletak pada model kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola potensi wisata alam. Kajian ini memberi dasar teoritis bahwa keberhasilan wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan dan kesadaran masyarakat setempat, hal yang juga menjadi fokus utama penelitian Tanaka Waterfall.</p>
4.	<p>Rachmawati, E., & Pasaribu, A. (2022). Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat Di</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pengembangan wisata di kawasan Lawe Gurah</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti wisata alam yang menekankan keseimbangan antara pengembangan</p>

	<p>Kawasan Wisata Lawe Gurah, Taman Nasional Gunung Leuser</p>	<p>ditentukan oleh kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan, melestarikan flora-fauna, dan mengelola homestay ramah lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik wisata alam tersebut. Pendekatan ekowisata berbasis masyarakat terbukti mampu meningkatkan pendapatan tanpa merusak ekosistem.</p>	<p>pariwisata dan pelestarian lingkungan. Kesamaannya terletak pada pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi. Kajian ini memperkuat dasar penelitian Tanaka Waterfall bahwa peran masyarakat tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan wisata.</p>
<p>5.</p>	<p>Anan, M., & Rahmah, S. A. (2024). Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas Melalui Pelatihan Msdm Bagi Penduduk Desa Wisata Pantai Cermin.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan manajemen sumber daya manusia (MSDM) sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata. Program pelatihan yang diberikan meliputi pengelolaan wisata,</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan wisata. Kesamaannya terletak pada upaya pemberdayaan komunitas agar lebih kompeten dalam mengelola</p>

		<p>pelayanan wisatawan, promosi digital, dan tata kelola keuangan. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih profesional dan mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui sektor pariwisata.</p>	<p>potensi lokal. Kajian ini mendukung penelitian Tanaka Waterfall dalam konteks perlunya pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat sekitar agar pengelolaan wisata lebih efektif dan berkelanjutan.</p>
6.	<p>Sarudin, R. (2023). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kampung Saungkuriang Kota Tangerang. Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata.</p>	<p>Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Saungkuriang terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya melalui peran aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan keterlibatan pihak swasta.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menekankan konsep <i>community based tourism</i> (CBT), yaitu masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi. Temuan jurnal tersebut dapat menjadi rujukan teoritis dan empiris untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat, pemerintah, dapat mendukung pengembangan Tanaka Waterfall berbasis komunitas, terutama dalam</p>

			aspek pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan budaya.
7.	Sriwijaya, R. R. A., Sutanto, C. L. V., Ramadhani, M. F., & Hafidz, S. A. (2024). Pariwisata Berbasis Komunitas sebagai Penggerak Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal: Strategi Pembangunan Ekowisata Bahari di Pulau Liki, Papua.	Pada penelitian ini ditemukan rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama terhambatnya pengembangan pariwisata berbasis komunitas, sehingga diperlukan pembentukan dan penguatan Pokdarwis untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata secara berkelanjutan.	Penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal (melalui pembentukan dan penguatan Pokdarwis) dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata alam secara berkelanjutan
8.	Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah Participatory Action Research. JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan	Pengembangan pariwisata berbasis komunitas efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal apabila disertai dengan partisipasi aktif warga, penguatan kelembagaan lokal, dan pengelolaan sumber daya wisata yang berkelanjutan	Penelitian ini sama-sama fokus terhadap proses pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi kegiatan wisata, di

	Masyarakat).	mana jurnal tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan komunitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kerja sama antara pengelola, masyarakat, serta pemerintah setempat menjadi faktor kunci keberhasilan.
--	--------------	--

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu masih menyoroiti tentang intervensi yang di dapat dari pemerintah atau lembaga swasta. Maka, kebaharuan penelitian ini terlihat pada fokus wilayah penelitian yang belum banyak dikaji dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian pariwisata berbasis komunitas di Indonesia masih berpusat pada kawasan yang telah mendapat intervensi pemerintah atau lembaga swasta, sedangkan Pariwisata dalam penelitian ini merupakan contoh nyata pengembangan yang tumbuh dari inisiatif masyarakat lokal tanpa dukungan besar dari pihak luar. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi penting dalam memahami model pengembangan pariwisata akar rumput yang menekankan kemandirian, adaptasi sosial, serta pelestarian lingkungan.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan sebuah sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai unsur seperti destinasi, masyarakat lokal, pemerintah, pelaku usaha, dan wisatawan yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan aktivitas. Pariwisata mencakup perencanaan, pengelolaan, penyediaan fasilitas, hingga kebijakan yang menunjang kegiatan pariwisata itu sendiri. Menurut penelitian Suwanto (2021), pariwisata juga merupakan sistem terpadu yang terdiri dari unsur atraksi, aksesibilitas, amenities, dan kelembagaan yang bekerja secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengalaman manusia. Dalam konteks ini, pariwisata bukan hanya sebatas mobilitas wisatawan, tetapi juga melibatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat sebagai bagian dari sistem kepariwisataan itu sendiri (Andjanie et al., 2023).

Lebih jauh, pariwisata juga dipandang sebagai fenomena sosial dan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan bersama. Menurut Kurniadinata dan Suhartini (2023), pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dengan memperkuat peran komunitas sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya. Dengan demikian, pariwisata bukan hanya tentang perjalanan fisik, melainkan tentang bagaimana suatu sistem dikelola untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak dalam satu ekosistem yang saling terkait (Sriwijaya et al., 2024).

Pariwisata berkembang seiring perubahan waktu dan tren global yang menuntut adanya keberlanjutan, inklusivitas, dan keseimbangan ekologis. Perkembangan ini menciptakan transformasi pada pola perjalanan, di mana wisatawan tidak lagi sekadar mencari hiburan, tetapi juga pengalaman autentik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan pariwisata dapat berlangsung di destinasi perkotaan maupun pedesaan yang memiliki daya tarik alam, budaya, sejarah, maupun buatan manusia yang khas. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah yang mampu mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya lokal yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan (Suprihardjo & Firdaus, 2022).

Namun, perkembangan pariwisata juga menimbulkan tantangan serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi, sehingga diperlukan pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan agar manfaat ekonomi dan sosialnya dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian alam. Jika tidak diatur secara berkelanjutan, peningkatan kunjungan wisatawan dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, peningkatan volume sampah, serta degradasi ekosistem di sekitar destinasi. Djuwendah et al. (2023) menemukan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam agrowisata berbasis komunitas di Jawa Barat mampu meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijak (Djuwendah et al., 2023). Sementara Guerrero-Moreno & Oliveira-Junior (2024) menambahkan bahwa keberlanjutan wisata hanya dapat tercapai bila komunitas lokal diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Guerrero-Moreno &

Oliveira-Junior, 2024). Dengan demikian, pariwisata bukan hanya tentang menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang bagaimana manusia berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab ekologis.

Selain memberikan manfaat ekonomi, pariwisata juga berfungsi sebagai media pertukaran sosial dan budaya yang mempertemukan beragam nilai, tradisi, dan gaya hidup. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal menciptakan proses pembelajaran sosial yang memperkaya kedua belah pihak, sehingga pariwisata menjadi sarana penting untuk memperkuat identitas budaya dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Namun demikian, pertumbuhan pariwisata yang tidak terencana dan tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan hilangnya nilai-nilai budaya asli. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui prinsip sustainable tourism development yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi (UNWTO, 2023).

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, sektor swasta menyediakan infrastruktur dan layanan, sementara masyarakat lokal menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang adil, partisipatif, dan berbasis komunitas. Selain itu, digitalisasi juga berperan penting dalam memperluas akses promosi dan meningkatkan daya saing destinasi wisata di era global. Platform digital seperti media sosial dan aplikasi perjalanan kini menjadi sarana utama wisatawan untuk merencanakan, membagikan, dan mengevaluasi pengalaman wisata mereka, yang secara

tidak langsung turut membentuk citra destinasi (Putra & Rahmawati, 2023).

Dengan demikian, pariwisata secara umum bukan hanya tentang perjalanan menuju suatu tempat, tetapi juga tentang proses sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang saling berhubungan dan membentuk sistem yang kompleks. Aktivitas ini mencerminkan dinamika manusia dalam menjelajah, berinteraksi, dan menciptakan makna dari pengalaman yang diperoleh. Ketika dikelola dengan prinsip keberlanjutan, pariwisata mampu menjadi kekuatan positif dalam memperkuat identitas lokal, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta menjaga keseimbangan alam. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang hakikat pariwisata menjadi dasar penting bagi setiap upaya pengembangan destinasi, khususnya di tingkat lokal, agar keberadaan pariwisata tidak hanya membawa manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekologis yang lestari (Wijaya et al., 2024; UNWTO, 2023).

2.2.2 Sosiologi Pariwisata

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia. Sedangkan Pariwisata sebagai ilmu membahas tentang kompleksitas aktivitas kelembagaan dari obyek wisata sehubungan dengan perjalanan wisata. Sosiologi pariwisata adalah salah satu disiplin sosiologi membahas aktivitas dan hubungan sosial di sektor pariwisata, yaitu orang sebagai kelompok pariwisata, organisasi maupun badan usaha kepariwisataan, kelembagaan pemerintah dan mobilitas sosial sehubungan dengan daya tarik obyek wisata. Sosiologi pariwisata sebagai studi tentang individu dan masyarakat, organisasi serta lembaga sosial yang berhubungan dengan layanan kebutuhan perjalanan wisata bagi wisatawan dan kegiatan kepariwisataan (Gede Yoga, 2019).

Sosiologi pariwisata merupakan disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara pariwisata dan masyarakat, khususnya bagaimana fenomena pariwisata memengaruhi struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan pola interaksi di dalam masyarakat. Pariwisata, sebagai fenomena sosial, tidak hanya terkait dengan aktivitas rekreasi atau ekonomi, tetapi juga membawa implikasi yang luas terhadap dinamika sosial, identitas budaya, dan interaksi antara individu maupun kelompok. Proses ini mencakup perubahan sosial yang terjadi di destinasi wisata akibat masuknya pengunjung dari berbagai latar belakang yang beragam. Sosiologi pariwisata juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan oleh berkembangnya destinasi wisata terhadap relasi antarkelompok, pola kehidupan, serta perubahan nilai dan norma sosial. Dalam banyak kasus, pariwisata menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan status sosial kelompok tertentu, dan memperluas jaringan interaksi antardaerah.

Namun, di sisi lain muncul pula potensi ketimpangan sosial ketika distribusi manfaat tidak merata atau terjadi marginalisasi terhadap masyarakat lokal yang tidak terlibat langsung dalam industri wisata. Oleh karena itu, sosiologi pariwisata membantu memahami bahwa pembangunan destinasi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya, sebab keberhasilan pariwisata sangat bergantung pada kemampuan komunitas lokal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan mempertahankan keseimbangan antara nilai tradisional dan modernitas yang dibawa oleh wisatawan (OECD, 2022; WTA, 2021).

Salah satu aspek yang dikaji dalam sosiologi pariwisata berkaitan dengan pengembangan pariwisata, pengembangan pariwisata adalah rangkaian aktivitas terencana yang mencakup identifikasi potensi destinasi, perencanaan produk wisata,

pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta penataan layanan atau pengalaman bagi wisatawan dengan tujuan meningkatkan daya tarik, aksesibilitas, dan nilai tambah destinasi tersebut. Proses ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan atraksi, promosi, hingga evaluasi dampak kegiatan wisata terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam praktiknya, pengembangan pariwisata tidak hanya dilakukan di wilayah yang telah populer, tetapi juga di daerah-daerah dengan potensi tersembunyi yang memiliki daya tarik alam maupun budaya yang unik. Tujuan dari pengembangan ini bukan hanya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk memperkuat identitas lokal, melestarikan sumber daya, dan mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh semua pihak dalam jangka panjang (Song et al., 2023).

Dalam konteks keilmuan dan praktik, pengembangan pariwisata memiliki beberapa unsur penting yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Oka A. Yoeti (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi fondasi dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa terdapat lima unsur utama yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata, yaitu :

1. Daya tarik wisata (*attraction*) merupakan inti dari kegiatan kepariwisataan karena menjadi alasan utama wisatawan melakukan perjalanan ke suatu tempat. Daya tarik ini dapat berupa keindahan alam seperti pegunungan, air terjun, pantai, danau, atau pesona

budaya seperti upacara adat, seni pertunjukan, arsitektur tradisional, dan kuliner khas daerah. Selain itu, daya tarik buatan seperti taman rekreasi, museum, atau kawasan wisata tematik juga menjadi faktor penentu. Oka A. Yoeti menekankan bahwa pengembangan daya tarik harus memperhatikan keaslian, keunikan, serta daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan degradasi sumber daya wisata.

2. Aksesibilitas (*accessibility*) mencakup seluruh sistem transportasi yang menghubungkan wisatawan dengan destinasi wisata, baik darat, laut, maupun udara. Kualitas aksesibilitas tidak hanya dilihat dari ketersediaan jalan atau moda transportasi, tetapi juga kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan biaya perjalanan. Tanpa aksesibilitas yang memadai, potensi wisata sebesar apa pun tidak akan optimal karena wisatawan kesulitan mencapai lokasi tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat lokal perlu berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur jalan, petunjuk arah, serta transportasi umum yang ramah wisatawan.

3. Amenitas (*amenities*) merupakan seluruh fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi, seperti penginapan, restoran, pusat informasi, tempat ibadah, hingga layanan kesehatan. Oka A. Yoeti menjelaskan bahwa amenities tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meliputi kualitas pelayanan dan keramahan yang diberikan oleh penyedia jasa pariwisata. Fasilitas yang memadai akan meningkatkan kepuasan wisatawan, memperpanjang masa tinggal, serta mendorong efek ekonomi berganda di daerah wisata.

4. Kelembagaan (*institution*) mencakup struktur organisasi, peraturan, serta sistem manajemen yang mengatur kegiatan kepariwisataan. Kelembagaan berperan penting dalam koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal agar pengelolaan

pariwisata berjalan efektif. Oka A. Yoeti menegaskan perlunya peran lembaga resmi seperti Dinas Pariwisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), maupun lembaga masyarakat dalam menyusun kebijakan, melakukan promosi, serta mengawasi keberlanjutan kegiatan wisata.

5. Masyarakat dan lingkungan (*community and environment*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai subjek, bukan hanya objek dari kegiatan wisata. Partisipasi mereka dalam perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi akan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi. Lingkungan juga harus dijaga agar pengembangan wisata tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, polusi, atau konflik sosial. Dengan demikian, keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci utama bagi pariwisata yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Oka A. Yoeti menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam atau potensi budaya, tetapi juga oleh keterpaduan antara unsur daya tarik, aksesibilitas, amenitas, kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Semua unsur ini harus direncanakan secara sistematis dan terintegrasi agar pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara sosiologi pariwisata dan pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi alam atau infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan sosial masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan yang dibawa oleh arus wisata. Pendekatan sosiologis

memungkinkan pengembangan pariwisata menjadi lebih manusiawi, berakar pada nilai lokal, dan berorientasi pada pemberdayaan (Atasoy, 2024). Melalui pemahaman terhadap struktur sosial, pola interaksi, serta nilai-nilai budaya masyarakat, pembangunan sektor pariwisata dapat diarahkan untuk menciptakan harmoni antara wisatawan dan tuan rumah, antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sosial, serta antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan ekosistem. Dengan pendekatan tersebut, pariwisata dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar industri yang mengejar keuntungan jangka pendek (Wijaya et al., 2024).

2.2.3 Pariwisata Berbasis Komunitas (*Community Based Tourism / CBT*)

Pariwisata Berbasis Komunitas atau bisa disebut *Community Based Tourism / CBT* adalah suatu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam seluruh proses kegiatan pariwisata sekaligus penerima manfaat langsung dari kegiatan wisata di wilayah mereka. Model ini memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol sumber daya serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari aktivitas pariwisata yang dilakukan (Hariyadi et al., 2024). Adapun komunitas sendiri dapat dipahami sebagai kumpulan individu yang tinggal atau berinteraksi dalam suatu wilayah geografis tertentu dan memiliki keterikatan sosial, budaya, nilai bersama, dan struktur kelembagaan lokal yang memungkinkan mereka untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam kehidupan sehari-hari (Widiastuti & Haris, 2021). Komunitas bukan hanya sekadar agregasi individu, melainkan sebuah sistem sosial yang terdiri dari norma, identitas bersama, kepercayaan, jaringan sosial, serta sumber daya sosial (*social capital*). Konsep ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan

pariwisata, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga subjek yang berperan penting dalam menciptakan, mengelola, dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata (LA Abreu, 2024).

CBT menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan pelestarian nilai-nilai lokal (Lestari, 2023). Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui atraksi wisata, kuliner, dan produk ekonomi kreatif yang mencerminkan karakter lokal (Putra, 2020). Keberhasilan pengembangan CBT sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan lokal, dan dukungan kebijakan dari pemerintah setempat (Herawati & Sugiarto, 2022).

Pelaksanaan pariwisata berbasis komunitas umumnya dilakukan di kawasan pedesaan, daerah terpencil, atau wilayah dengan potensi alam dan budaya yang khas. Lokasi-lokasi ini menawarkan pengalaman wisata yang autentik dan berorientasi pada interaksi langsung antara wisatawan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Dalam praktiknya, kegiatan CBT mencakup penyediaan homestay, kuliner tradisional, kerajinan lokal, pertunjukan budaya, hingga ekowisata berbasis konservasi lingkungan. Melalui aktivitas tersebut, wisatawan tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga turut belajar tentang kearifan lokal, cara hidup masyarakat, serta nilai-nilai keberlanjutan yang diterapkan secara nyata. Hubungan antara wisatawan dan masyarakat dalam konteks ini bersifat saling menguntungkan, wisatawan memperoleh pengalaman otentik, sementara masyarakat memperoleh pendapatan sekaligus dorongan moral untuk terus

menjaga lingkungan dan warisan budaya mereka (Hariyadi et al., 2024).

Penerapan CBT tidak terlepas dari tantangan struktural dan sosial. Ketika kepemilikan aset wisata tidak diatur secara adil atau terjadi dominasi oleh pihak eksternal, maka potensi konflik, ketimpangan, dan komersialisasi budaya bisa muncul. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas manajerial, rendahnya literasi digital, dan minimnya akses permodalan di tingkat komunitas. Oleh karena itu, keberhasilan pariwisata berbasis komunitas sangat bergantung pada sejauh mana kemampuan masyarakat dalam membangun kelembagaan lokal yang solid, sistem bagi hasil yang transparan, dan jaringan kemitraan yang seimbang dengan pemerintah maupun sektor swasta. Dalam hal ini, dukungan kebijakan pemerintah menjadi kunci, baik dalam bentuk regulasi yang berpihak pada masyarakat maupun program pendampingan dan pelatihan yang memperkuat kemampuan manajemen destinasi (Putra & Rahmawati, 2023).

Selain aspek ekonomi dan sosial, pariwisata berbasis komunitas juga memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menjadikan masyarakat sebagai pengelola langsung sumber daya alam, kegiatan wisata dapat diarahkan untuk mendukung upaya konservasi, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, serta perlindungan flora dan fauna lokal. Model ini terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran lingkungan karena masyarakat memiliki ikatan emosional terhadap wilayahnya, sehingga setiap aktivitas wisata yang dilakukan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Dalam jangka panjang, CBT mampu menciptakan keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi sumber daya, sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap potensi lokal mereka, bukan sekadar sumber pendapatan, tetapi juga identitas dan warisan yang harus dijaga (Kunjuraman,

2022).

Pariwisata berbasis komunitas dan keberadaan komunitas sebagai aktor utama di dalamnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua sisi dari satu kesatuan sistem yang saling bergantung. Ketika komunitas memiliki peran aktif dan kesadaran kolektif untuk mengelola potensi wisatanya, maka keberlanjutan destinasi akan terjamin karena pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan berpihak pada kepentingan lokal (Abreu, 2024). Sebaliknya, jika peran komunitas diabaikan, maka pariwisata berisiko menjadi kegiatan eksploitatif yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Oleh sebab itu, pariwisata berbasis komunitas menjadi pendekatan strategis untuk memastikan pembangunan pariwisata yang inklusif, adil, dan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologis melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan (Wijaya, 2024).

CBT bukan hanya soal penciptaan produk wisata, melainkan juga soal pembangunan kapasitas manusia dan tata kelola lokal yang memungkinkan komunitas mengatur pembagian manfaat dan memitigasi potensi ketimpangan internal (Priatmoko, 2021). Meski menjanjikan, CBT menghadapi risiko seperti ketergantungan pada pasar pariwisata, potensi komersialisasi budaya, konflik internal terkait distribusi manfaat, serta tekanan terhadap sumber daya alam apabila pengelolaan kapasitas kunjungan tidak dilakukan (Kunjuraman, 2022). Oleh karena itu, implementasi CBT yang berhasil harus menggabungkan perencanaan partisipatif, indikator lingkungan-sosial-ekonomi untuk monitoring, dan dukungan kebijakan publik (LA Abreu, 2024). Dalam implementasinya, CBT tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan pelestarian

lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal agar mampu mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan (Asmarani et al., 2023). Oleh karena itu, CBT sering dianggap sebagai strategi efektif dalam mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis pemberdayaan komunitas.

2.3 Kajian Teori

Teori Modal Sosial menurut Robert D. Putnam menjelaskan bahwa modal sosial (*social capital*) adalah jaringan hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama antarindividu dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Robert D. Putnam, modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), dan norma sosial (*social norms*), khususnya norma timbal balik (*reciprocity*), yang mendorong kerja sama dalam masyarakat. Menurut Putnam (1993; 2000), modal sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas suatu komunitas karena kepercayaan dan partisipasi sosial dapat memperkuat solidaritas, memperlancar komunikasi, serta menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. Robert D. Putnam (1993, 2000) menekankan bahwa keberhasilan suatu komunitas dalam mencapai tujuan bersama sangat bergantung pada:

2.3.1 Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan unsur paling mendasar dalam modal sosial, karena menjadi dasar terciptanya hubungan sosial yang kuat dan saling menguntungkan antaranggota masyarakat. Menurut Putnam (1993), kepercayaan memungkinkan individu untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas, kepercayaan antaranggota masyarakat serta antara masyarakat dan pihak pengelola wisata berperan penting dalam menjaga

komitmen dan kolaborasi.

2.3.2 Jaringan Sosial (*Social Networks*)

Jaringan sosial mengacu pada hubungan atau keterikatan antarindividu dan kelompok dalam suatu komunitas. Jaringan ini berfungsi sebagai saluran pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan sosial yang dapat memperkuat kerja sama. Coleman (1990) menjelaskan bahwa jaringan sosial yang kuat menciptakan rasa keterhubungan yang memudahkan koordinasi dan tindakan kolektif. Dalam konteks pariwisata, jaringan sosial antar pelaku wisata dan masyarakat lokal menjadi faktor utama keberhasilan dalam mengelola dan memasarkan destinasi wisata secara partisipatif.

2.3.3 Norma Sosial (*Social Norms*)

Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mendorong individu dalam masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama berdasarkan rasa saling percaya. Norma ini menciptakan hubungan timbal balik, di mana seseorang memberikan bantuan dengan keyakinan bahwa kebaikan tersebut akan dibalas di masa mendatang, baik oleh orang yang sama maupun anggota komunitas lainnya. Dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas, norma timbal balik berperan penting karena menumbuhkan semangat gotong royong, memperkuat solidaritas, dan membangun kepercayaan antarwarga, sehingga aktivitas pariwisata dapat berjalan harmonis, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bersama bagi masyarakat lokal.

Ketiga unsur ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, termasuk dalam pengelolaan sumber daya bersama seperti sektor pariwisata. Dalam pandangan sosiologi, modal sosial tidak hanya menjadi alat

membangun hubungan sosial, tetapi juga menjadi mekanisme integrasi sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi antarwarga (Asmarani et al., 2023). Dalam karyanya seperti “*Bowling Alone*”, Putnam menyoroti bahwa modal sosial merupakan “fitur organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama”. Modal sosial menjadi “perekat sosial” yang memungkinkan kerja sama, partisipasi, dan solidaritas tumbuh di dalam komunitas (Putnam, 2000).

Dalam kerangka Putnam, modal sosial dibedakan dalam konsep *bonding social capital* (ikatan erat dalam kelompok homogen) dan *bridging social capital* (jaringan antara kelompok yang berbeda). Putnam membagi modal sosial menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. **Bonding**, yaitu hubungan yang terjalin erat di antara anggota dalam kelompok yang homogen, seperti keluarga, teman dekat, atau komunitas lokal. Bentuk ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas internal.
2. **Bridging**, yaitu hubungan yang terjalin antara kelompok yang berbeda atau heterogen, misalnya antara masyarakat lokal dengan pihak luar seperti pemerintah, pelaku usaha, atau wisatawan. Bentuk ini penting untuk memperluas jaringan, memperkuat kerja sama lintas kelompok, dan membuka peluang baru bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Teori ini juga menggaris bawahi bahwa modal sosial bersifat kolektif dan dapat mempengaruhi kinerja komunitas dalam hal kapasitas kolektif, partisipasi, dan pembangunan lokal. Dalam konteks pariwisata berbasis komunitas (CBT), modal sosial menurut Putnam sangat relevan karena aspek kepercayaan, norma, dan jaringan sosial komunitas menjadi fondasi utama agar anggota masyarakat dapat bekerja bersama,

mengambil keputusan kolektif, mengatur pembagian manfaat, dan melaksanakan pengelolaan destinasi secara bersama. Beberapa studi mutakhir menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat modal sosial tinggi lebih mampu menjalankan CBT secara berkelanjutan, misalnya melalui kerjasama, solidaritas, dan partisipasi aktif dalam kegiatan wisata.

Modal sosial juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan komunitas untuk mengatur diri sendiri (*self-governance*) tanpa harus terlalu bergantung pada intervensi eksternal. Konsep ini menunjukkan bahwa kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah tidak hanya bergantung pada modal fisik atau modal manusia, tetapi juga pada kekuatan hubungan sosial antarwarganya (Supriadi & Haris, 2023). Dengan demikian, keberadaan modal sosial menjadi pondasi utama terbentuknya masyarakat yang berdaya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan lokal. Dalam penerapannya, modal sosial menjadi faktor penentu keberhasilan berbagai program berbasis masyarakat seperti *Community Based Tourism* (CBT). Menurut Lestari et al. (2023), tingkat kepercayaan dan partisipasi warga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan wisata berbasis komunitas karena keberhasilan pengelolaan wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi alamnya, tetapi oleh kekuatan jejaring sosial di dalamnya. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan satu sama lain dan menjalin kerja sama yang solid, maka aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berjalan selaras. Hal ini menegaskan bahwa modal sosial menjadi aspek sosiologis yang berperan besar dalam penguatan kapasitas komunitas di sektor pariwisata.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam sebagai dasar untuk memahami bagaimana kekuatan hubungan sosial berperan penting

dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Teori ini dianggap relevan karena menekankan bahwa keberhasilan suatu kegiatan sosial, termasuk pariwisata, tidak hanya bergantung pada sumber daya ekonomi atau dukungan eksternal, tetapi juga pada kekuatan jaringan sosial, kepercayaan antarindividu, dan norma yang hidup di masyarakat. Melalui perspektif ini, peneliti melihat bahwa kepercayaan, gotong royong, serta rasa kebersamaan menjadi unsur utama yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Melalui teori modal sosial Putnam, penelitian ini dapat memahami bagaimana hubungan sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat memengaruhi proses pengembangan wisata berbasis komunitas. Jaringan sosial menjadi sarana penting dalam pertukaran informasi dan koordinasi antaranggota komunitas, sementara kepercayaan sosial berperan dalam memperkuat komitmen bersama terhadap keberlanjutan wisata. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan wisata menunjukkan adanya norma dan solidaritas sosial yang berfungsi menjaga harmoni sosial di tengah aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Dengan demikian, teori modal sosial Putnam memberikan kerangka analisis yang kuat untuk menelusuri bagaimana modal sosial berperan sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan promosi, tetapi terutama pada kohesi sosial, kepercayaan, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai penggerak utama.

Teori Modal Sosial Putnam dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana kekuatan hubungan sosial menjadi dasar keberhasilan pengembangan wisata berbasis komunitas. Teori ini menyoroti aspek relasional antar individu dan partisipasi sosial yang

muncul secara organik dari bawah (*bottom-up*). Secara keseluruhan, teori modal sosial Putnam memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami peran jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Melalui teori ini, penelitian dapat mengungkap bahwa keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya bertumpu pada modal ekonomi, tetapi juga pada kohesi sosial dan partisipasi warga lokal yang menjadi roh dari pariwisata berbasis komunitas. Oleh karena itu, teori modal sosial Putnam menjadi landasan yang paling relevan dalam menjelaskan dinamika sosial dan kolaborasi masyarakat dalam membangun wisata yang berkelanjutan.

